

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Basuki, J. (2018). *Administrasi Publik: Telaah Teoretis dan Empiris*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan 6). Alfabeta.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Sazali, H. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri.
- Subarsono, AG. (2022). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang Bayu media Publishing.

Jurnal

- Abrianto, D. D., & Fathurahman, H. (2024). Analysis of the Policy on Implementing Digital Population Identity in the Compulsory E-KTP Community in Surakarta City. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 51-59.
- Amani, W., Mauludy, A. H., Musa, A. M., Damayanti, E., Amalya, S. R., Karani, S. N., & Syamsi, W. N. (2013). *Pengertian Ilmu Administrasi Publik*. 1– 22.
- Bella, V. S., dan Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31.
- Damayanti, R., Fauzi, Z., & Ridhani, A. R. (2020). Model Bimbingan Kelompok Teknik Draw a Bridge dalam Meningkatkan Motivasi Belajar. *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 3(2), 72-78.
- Ekram, I., Tuanaya, W., dan Wance, M. 2022. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik kantor manunggal satu atap provinsi maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Fahlevi, R. 2021. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Memiliki Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Ganda Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 677-690.

- Febrianti, O. D., & Prabawati, I. (2023). Implementasi Kebijakan Sedudo (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) Di Kantor Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 1435-1446.
- Firdaus, A. D., & Wibawani, S. (2022). Innovation Of Digital Identity Application (Ikd) In Improving Public Services In Gunung Anyar Urban Village. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 4(2), 589-599.
- Gustiana, Z. N., & Pohan, S. (2024). Efektifitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 251-257.
- Hunaifi, N., Hikmah, A. B., dan Nurhasan, A. 2019. Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Dan Permohonan Surat Online “Sipadu” Di Tingkat Kecamatan Berbasis Web. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 10(1), 40-51.
- Jayasinga, I. P. A., & Triono, A. (2023). Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 484-490.
- Mufidah, I. S. T. N. A. (2021). Pengaruh fasilitas dan pelayanan bank terhadap minat transaksi di bri syariah kc purwokerto pada mahasiswa institut agama islam negeri (iain) purwokerto tahun akademik 2017/2018. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1-13.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50-58.
- Novan Mamoto, I. S. dan G. U. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Patu, F., & Pramudiana, I. D. (2023). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan E-Ktp Bagi Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 1-8.
- Pitry, W. J., dan Aprizal, A. 2023. Perancangan Sistem Informasi Permohonan Surat Online “Paten” Di Tingkat Kecamatan Kuantan Mudik Berbasis Web. *Jurnal Perencanaan, Sains Dan Teknologi (Jupersatek)*, 6(1), 88-92.
- Prasetyo, M. A., & Hertati, D. (2024). Implementasi Klampid New Generation (KND) Dalam Menunjang Optimalisasi Pelayanan Cetak Ulang E-Ktp Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 479-490.

- Prastiyono, V. I., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2021). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 240-258.
- Purba, Y. O., dan Mauluddin, A. (2023). Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5(2), 55-66.
- Rachman, A., dan Djumiarti, T. (2019). Kualitas Pelayanan Dalam Proses Pembuatan E-Ktp Di TpdK Dispendukcapil Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4), 380-391.
- Rahayu, G., & Jumiati, J. (2023). Implementation of the Dukcapil Go Digital Programs at the Payakumbuh City Government. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 83-94.
- Rahmawati, L., Arlan, A. S., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 25-30.
- Rahmawati, Y. D., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2023). Faktor-Faktor Ketidakterhasilan Implementasi Program Sidekem (Sistem Informasi Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan) Di Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 66-78.
- Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.
- Ristiandy, R. (2021). Disintegrasi Data Kependudukan antar OPD Layanan Publik Kabupaten Belitung Timur di Tengah Arus Revolusi Industri 4.0. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 87-96.
- Rusdiani, A. (2013). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Safitri, D. V. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(2), 59-65.
- Supriyanto, D. F., Prabowo, S., Widodo, A. S., dan Eldo, D. H. A. P. 2021. Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Masa Pandemi (Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kabupaten Karawang). *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 40-49.

Syahrani, M. (2020). Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*, 4(2), 19-23.

Zafira, S. A. (2024). *Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

Website Internet

Hoirunisa, J. (2024). Baru 32.069 Masyarakat Tangsel yang Sudah Aktivasi IKD, Disdukcapil: Warga Minim Antusias. <https://tangselife.com/news/baru-32-069-masyarakat-tangsel-yang-sudah-aktivasi-ikd-disdukcapil-warga-minim-antusias>.

Pardede, S. (2024). Baru 45.839 Warga Punya Identitas Kependudukan Digital. <https://tangerangekspres.disway.id/read/29684/baru-45839-warga-punya-identitas-kependudukan-digital>.

Simanjorang, R. (2023). Tingkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Tangsel, Disdukcapil Lakukan Langkah Ini. <https://tangerang.tribunnews.com/2023/07/28/tingkatkan-aktivasi-identitas-kependudukan-digital-di-tangsel-disdukcapil-lakukan-langkah-ini>.

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Pendudukan Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026.

Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembentukan Identitas Kependudukan Digital.

Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 400.12.2.1/1543/DISDUKCAPIL/2023 tentang Pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Layanan Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.